

PENARIKAN DIRI INGGRIS DARI UNI EROPA TAHUN 2016

Indah Sri Lestari¹
Nim. 1002045129

Abstract

The withdrawal of the United Kingdom from European Union which implemented by referendum on June 23rd 2016 is the first phenomenon that occurred in the EU. This event shocked the various parties because UK has been a member of EU for 43 years. The withdrawal would affects to the relations between The UK and The EU in the future. When UK decided to leave from EU, the trade relations and single market access would be more difficult. With the advent of the various consequences of the withdrawal, hence the reason behind the decisions becomes an interesting thing to research. The result showed that the reason behind the UK withdrawal came from publics disappointment against some regulations and policies that are considered not represent the interest of the UK. The economic side of UK feel burdened with a large of EU's dues while a very small return is receipt. In the aspects of policy, the UK also wants the freedom to regulate the restrictions on immigrant welfare. And the last, The UK demanding for the absence of discrimination against non-eurozone country.

Keywords: *European Union, United Kingdom, Withdrawal*

Pendahuluan

Uni Eropa merupakan sebuah lembaga supranasional yang sasaran jangkauannya melebihi batas politis dan geografis negara. Masuknya negara-negara ke dalam integrasi Eropa bertujuan untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Oleh karenanya, setiap negara anggota wajib menggabungkan kedaulatan masing-masing yang diartikan sebagai pengalihan sebagian kekuasaan pada Uni Eropa untuk memutuskan kebijakan yang melibatkan kepentingan bersama dan dilakukan secara demokratis. (www.eeas.europa.eu)

Uni Eropa dibentuk melalui serangkaian proses panjang yang dimulai dengan pembentukan ECSC (*European Coal and Steel Community*) pada tanggal 20 Juni 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 18 April 1951, kemudian semakin berkembang kedalam lingkup kerjasama yang lebih besar menjadi EEC (*European Economic Community*) dan Euratom (*European Atomic Energy Community*). Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1957 keseluruhan kerangka kerja sama Eropa melebur di bawah naungan EC (*European Community*). Pada tahun 1992 melalui traktat Maastricht EC kembali mengalami perubahan menjadi EU (*European Union*).

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aozoradaisuki47451@gmail.com

Dalam proses integrasi terjadi peningkatan ekonomi cukup signifikan diantara negara anggota Uni Eropa sehingga menarik minat Inggris untuk bergabung kedalamnya. Inggris kemudian mulai mengajukan proposal keanggotaan pada tahun 1961, namun upaya tersebut ditolak oleh Presiden Perancis Charles de Gaulle sebagai bentuk penentangan terhadap ide perluasan Uni Eropa. Namun, setelah berakhirnya masa jabatan Charles de Gaulle, Inggris kembali mengajukan keanggotaan dan secara resmi diterima pada tahun 1973.

Pasca bergabung kedalam Uni Eropa, ekonomi Inggris cenderung meningkat lebih signifikan dibandingkan peningkatan sebelumnya yang dilihat berdasarkan tingkat GDP dan volume perdagangan bersama Uni Eropa. Namun, dalam dua tahun pasca bergabung dengan Uni Eropa, Inggris memutuskan untuk mempertimbangkan kembali status keanggotaannya berdasarkan janji PM Harold Wilson yang menyatakan bahwa jika keanggotaan Inggris di EEC tidak memberikan perubahan dalam masa enam bulan, maka sebuah referendum akan digelar. Partai konservatif yang berkuasa di parlemen saat itu, mendapatkan banyak dukungan atas keanggotaan Inggris dalam *common market*, namun banyak pula pejabat tinggi yang menginginkan untuk keluar. (www.newstatement.com) Berdasarkan hasil suara yang diperoleh dalam referendum tersebut, jumlah suara sebesar 67% memilih agar Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.

Berkaitan dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Inggris kembali menggelar referendum untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Juni 2016. Referendum yang dikenal sebagai referendum brexit merupakan pemungutan suara dari seluruh dari seluruh warga negara Inggris, Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia untuk memutuskan apakah Inggris Raya harus keluar dari Uni Eropa atau tetap berada dalam keanggotaannya. Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 ini bukan yang pertama bagi Inggris, sebelumnya Inggris pernah melaksanakan referendum serupa di tahun 1975 dengan kemenangan diperoleh suara “Ya” sebesar 67% yang menginginkan agar Inggris tetap bergabung bersama Uni Eropa.

Referendum brexit bermula ketika PM David Cameron dalam pidatonya tahun 2013 menjanjikan bahwa ia akan menggelar referendum jika dirinya terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Selanjutnya terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat umum maupun elit politik terhadap opini penarikan diri Inggris dari Uni Eropa. Dalam pro dan kontra tersebut, terjadi perang kampanye yang dilakukan oleh pendukung brexit maupun kubu anti brexit. Dalam hal ini pemerintah Inggris mengeluarkan dana sebesar 9 juta pounsterling untuk mencetak brosur kampanye agar masyarakat Inggris memilih *remain*. Selain itu, Perdana Menteri David Cameron yang berada pada kubu *remain* menekankan kepada masyarakat bahwa brexit akan membawa kegelapan pada masa depan Inggris. Hal ini diperkuat dengan analisis menteri keuangan Inggris George Osborne yang menunjukkan bahwa setelah dua tahun pasca brexit, Inggris akan mengalami tekanan ekonomi berupa penurunan GDP sebesar 3,6%, inflasi akan meningkat sebesar 2,3%, tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 1,6 % dengan jumlah 520.000 jiwa. Upah rata-rata akan menurun sebesar 2,8%, bisnis properti akan menurun sebesar 10%, nilai poundsterling menurun sebesar 12%. Berdasarkan data-data tersebut, Osborne ingin menunjukkan bahwa ekonomi Inggris akan mengalami keterpurukan jika masyarakat memilih leave dari Uni Eropa. Sementara, kubu pro

brexit yang direpresentasikan oleh mantan walikota Inggris Boris Johnson, menyatakan bahwa dengan brexit Inggris dapat mengendalikan mata uang nasional, memperoleh kekuatan sebagai negara mandiri, dan memiliki masa depan ekonomi. Pada dasarnya kubu pro brexit selalu menekankan pada keuntungan yang diperoleh Inggris, sementara kubu anti brexit memiliki pendapat sebaliknya. (www.metro.co.uk)

Fenomena brexit kemudian menjadi peristiwa yang cukup menarik perhatian dunia karena terjadi di kawasan Eropa yang merupakan sebuah model integrasi kawasan terbaik di dunia. Berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekitar 30 juta konstituen Britania Raya dengan partisipasi suara mencapai 72,2% diperoleh hasil yaitu sekitar 51,9 % suara memilih untuk keluar, sementara 48,2% lainnya memilih untuk bertahan di Uni Eropa. (www.bbc.com) Dengan kemenangan perolehan suara *leave* melalui referendum, maka dengan demikian diputuskan bahwa Inggris akan menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa.

Pada dasarnya brexit telah memberikan dampak pada aspek ekonomi maupun politik Inggris. Dalam hal politik, terjadi pro kontra dikalangan masyarakat maupun politisi Inggris mengenai keuntungan maupun kerugian Inggris ketika bergabung dalam lembaga supranasional tersebut. Kubu pro brexit selalu menekankan pada keuntungan yang diperoleh Inggris, sementara kubu anti brexit memiliki pendapat sebaliknya. Secara ekonomi, Inggris mulai menghadapi penurunan ekonomi yang disebabkan jatuhnya nilai saham dan nilai mata uang pounsterling pada titik terendah. Poundsterling sempat menyentuh angka \$1,3305 atau turun sebesar 10%. Padahal sebelum hasil suara dihitung, pound sempat menyentuh \$1,50 karena pasar berspekulasi bahwa Inggris akan tetap bertahan di Uni Eropa. Namun, saat suara pendukung brexit justru meningkat, pound seketika turun pada angka \$1,43 dan semakin melemah saat *leave* memimpin perolehan suara. Selain itu, nilai tukar poundsterling juga melemah terhadap euro ke level 1,2085 per euro. (www.bbc.com)

Selama bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris telah mendapatkan berbagai kemudahan dalam mekanisme integrasi tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh Inggris selama bergabung di Uni Eropa adalah sebagai berikut:

1. Akses pasar tunggal Eropa

Pasar tunggal Eropa merupakan sebuah kawasan tanpa batas dan hambatan regulasi untuk menciptakan kebebasan aliran barang dan jasa. Pasar tunggal berfungsi untuk meningkatkan persaingan perdagangan, meningkatkan efisiensi, menciptakan kualitas dan menurunkan harga. Pasar tunggal Eropa merupakan salah satu pencapaian terbesar Uni Eropa. Mekanisme ini telah memicu pertumbuhan ekonomi dan membuat kehidupan konsumen Eropa menjadi lebih mudah. (www.ec.europa.eu)

Pasar tunggal Eropa memberikan kemudahan bagi Inggris dalam hal ekspor dan bea cukai. Ekspor Inggris sebesar 51,4% dapat dipastikan masuk kedalam pasar Uni Eropa. Selain itu, CBI (*Confederation of British Influence*) memperkirakan bahwa keuntungan Inggris berdasarkan keanggotaan di Uni Eropa adalah 4-5% dari total GDP atau 62-78 milyar Euro per tahun.

2. Kebebasan Mobilitas

Selain kebebasan aliran barang dan jasa, Uni Eropa juga menjamin adanya kebebasan pergerakan manusia. Dalam hal ini kebebasan tersebut diatur dalam perjanjian Schengen yang memungkinkan masyarakat untuk melintasi batas internal Uni Eropa tanpa diberlakukan pemeriksaan perbatasan. Sekalipun Inggris bukan merupakan negara yang termasuk kedalam area Schengen, namun Inggris turut merasakan kemudahan untuk melakukan perjalanan ke negara Eropa lainnya tanpa menggunakan pemeriksaan yang ketat. Aturan kebebasan perpindahan manusia juga termasuk atas kebebasan perpindahan pekerja yang membantu bisnis Inggris untuk mengisi lowongan keahlian. Berdasarkan survei CBI (*Confederation of British Industry's*) menyatakan bahwa kemampuan untuk menarik dan mengirim pekerja lintas UE memiliki dampak positif bagi bisnis Inggris yang termasuk 48% dari SMEs (*Small and Medium-sized enterprises*). Masyarakat Inggris juga diuntungkan dari kebebasan pekerja, yakni sebesar $\frac{3}{4}$ juta penduduk Inggris tinggal di negara Eropa lainnya. (www.ec.europa.eu)

3. Meningkatkan Aliran Investasi kedalam Inggris

Aliran investasi lintas batas di dalam Uni Eropa telah meluas bersamaan dengan diperkenalkannya pasar tunggal Eropa. Sebagai salah satu negara tujuan investasi UE, Inggris merupakan penerima keuntungan utama sebesar 47% dari saham yang masuk ke dalam FDI (*Foreign Direct Investment*) diakhir tahun 2011 dengan nilai investasi lebih dari \$1,2 triliun. (www.cbi.org) Akses terhadap pasar tunggal juga membantu menarik investasi kedalam Inggris yang berasal dari luar UE. CBI juga menyatakan bahwa kemampuan investasi diluar negara-negara UE berdampak positif bagi bisnis dalam negeri.

4. Menciptakan Jutaan Lapangan Pekerjaan

Laporan dari CEBR (*Centre for Economics and Business Research*) yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2015 menyatakan bahwa 3,1 juta pekerjaan yang ada di Inggris berhubungan dengan ekspor Inggris ke Uni Eropa. Sebagai tambahan, banyak pengusaha industri menyatakan bahwa Inggris diuntungkan dari keanggotaannya dalam pasar tunggal dan perjanjian pasar bebas termasuk bahwa keduanya secara langsung menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi Inggris. Selain itu, Uni Eropa juga menyediakan subsidi yang besar bagi petani Inggris, membantu meningkatkan pertanian dan memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi 476.000 orang yang terlibat secara langsung dalam bidang pertanian maupun yang bekerja dalam sektor yang berhubungan dengan industri. (www.independent.co.uk)

5. Perlindungan Terhadap Konsumen

Dalam Uni Eropa undang-undang perlindungan konsumen menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil ketika melakukan berbagai transaksi jual beli. Dalam Piagam hak asasi dasar dan traktat-traktat Eropa terdapat jaminan terhadap konsumen berupa: (1) Perlakuan yang adil; (2) Produk yang memenuhi standar; (3) Hak ganti rugi jika terjadi suatu kesalahan. Secara umum perlindungan konsumen meliputi berbagai aturan seperti keamanan produk dan makanan. Aturan mengenai konsumen dan pemasaran bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi konsumen dari ketidakadilan praktek komersil dan

perjanjian hukum konsumen seperti penyalahgunaan iklan dan kecurangan kontrak. (www.ec.europa.eu)

Selain mendapatkan keuntungan dalam masa keanggotaannya, disisi lain Inggris juga memberikan beberapa peranan penting bagi UE yaitu:

1. Kontribusi dalam Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Inggris memainkan peranan dalam penelitian dan mobilitas pelajar Eropa. Berdasarkan data EUA (European University Association) menunjukkan bahwa Inggris memiliki jumlah publikasi dan peserta terbanyak dalam program penelitian Uni Eropa. Lebih dari 330.000 publikasi dihasilkan berdasarkan kolaborasi Inggris dengan peneliti Uni Eropa antara tahun 2003 hingga 2012. EUA juga menyebutkan bahwa Inggris merupakan negara dengan peserta terbesar dalam Horizon 2020, sebuah program penelitian Uni Eropa dan mengelola 20% dari keseluruhan agenda program.

2. Inggris merupakan salah satu negara kontributor terbesar ketiga bagi Anggaran Uni Eropa. Di tahun 2015 Inggris jumlah pembayaran iuran Inggris sebesar 17,8 miliar Euro, lalu dipotong dengan *rebate* menjadi 12,9 miliar Euro. Dengan demikian setiap orang di Inggris harus menyumbang sebesar 200 Euro dalam anggaran Uni Eropa.

Walaupun referendum brexit sedianya telah digelar, namun langkah Inggris untuk keluar dari mekanisme Uni Eropa masih sangat panjang. Berdasarkan traktat Lisbon pasal 50, negara anggota yang melakukan penarikan diri harus memastikan terbentuknya sejumlah perjanjian yang menandai hubungan baru antara negara yang dimaksud dengan Uni Eropa. Dalam hal ini Inggris sebagai negara yang menarik diri harus membentuk perjanjian-perjanjian dengan UE berupa: (1) Perjanjian penarikan diri dari Uni Eropa; (2) Perjanjian hubungan baru bersama Uni Eropa; (3) Perjanjian hubungan dagang baru dengan sejumlah negara non-UE (karena perjanjian UE bersama negara ketiga akan dihentikan bagi Inggris). Masa pembentukan perjanjian ini akan dibatasi selama dua tahun/ lebih sesuai dengan kesepakatan dewan Eropa. (www.cmslegal.com)

Berdasarkan skema penarikan diri Inggris dari UE, tahap pertama adalah pengumuman kepada Uni Eropa sesuai ketentuan pasal 50 dari traktat UE dan mengadakan pertemuan dengan 27 negara anggota UE lainnya. Tahap kedua adalah Negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa, pengajuan draft kesepakatan kepada dewan Eropa, dimana draft tersebut harus diterima oleh lebih dari 20 negara anggota dengan jumlah 65% dari total populasi, ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen Eropa. Tahap ketiga, ketika tidak ada perjanjian untuk memperpanjang negosiasi maka traktat UE berhenti diterapkan pada Inggris. Tahap terakhir adalah Inggris meninggalkan UE dengan mencabut undang-undang komunitas Eropa dan menggantinya dengan perjanjian yang baru. Dalam proses ini, jika Inggris ingin kembali masuk Uni Eropa maka harus mengajukan proposal sebagaimana negara lainnya.

Setelah keputusan brexit diumumkan, Perdana menteri David Cameron disaat yang sama juga mengumumkan pengunduran dirinya yang berlangsung pada bulan Oktober 2016. Sejak opini brexit muncul ditengah publik, Cameron dikenal sebagai

pihak yang memimpin kampanye agar Inggris tetap bersama dengan Uni Eropa. Dalam pengunduran dirinya Cameron mengatakan,

“I will do everything I can as prime minister to steady the ship over the coming weeks and months, but I do not think it would be right for me to try to be the captain the steers our country to its next destination.”

Dalam pernyataannya, Cameron merasa bahwa ia tidak memiliki hak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai perdana menteri Inggris, sehingga dengan pengunduran diri tersebut menunjukkan bahwa proses penarikan diri Inggris dari Uni Eropa akan dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya. (www.nytimes.com)

Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa juga sangat disayangkan oleh berbagai pihak terutama Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, namun keputusan tersebut tetap diterima sebagai bentuk penghargaan terhadap aspirasi masyarakat Inggris. Dalam hal ini, Eropa yang diwakili oleh ketua komisi Eropa Jean-Claude Juncker, ketua dewan Eropa Donald Tusk, ketua parlemen Eropa Martin Schulz, dan Perdana Menteri Jerman Mark Rutte menyatakan:

“We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of British people as soon as possible, how ever painful that process may be. Any delay would unnecessarily prolong uncertainty. We hope to have the UK as a close partner of the EU also in the future.”

Dalam pernyataan tersebut mereka mengharapkan agar pemerintah Inggris secepatnya menjalankan keputusan penarikan diri ini kepada masyarakat Inggris betapapun menyakitkannya proses yang harus dijalani. Karena sedikit saja penundaan akan semakin memperpanjang ketidakpastian. Oleh karena itu, para petinggi Eropa juga berharap bahwa Inggris akan tetap menjadi rekan dekat bagi Uni Eropa di masa mendatang.”

Beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya juga memberikan pendapat mengenai brexit yang di wakili oleh Presiden maupun perdana menteri mereka. Negara-negara tersebut diantaranya adalah:

1. Perancis, Francois Hollande menyatakan,

“This is a painful choice and it is deeply regrettable both for the UK dan Europe. But this choice is theirs and we must respect it, accepting all the consequences. The British vote is a tough test for Europe.”

Bagi Perancis pilihan referendum merupakan pilihan menyakitkan dan secara mendalam disesalkan bagi keduanya baik Inggris maupun UE. Akan tetapi pilihan tersebut adalah milik mereka dan Perancis harus menghargainya serta menerima segala konsekuensinya. Pemungutan suara Inggris merupakan ujian yang cukup berat bagi Uni Eropa.

2. Kanselir Jerman, Angela Merkel,

”We take note for the British people’s decisions with regret. There is no doubt that this is a blow to Europe and to the European unification process.”

Keputusan Inggris untuk melakukan referendum sangat disesalkan oleh Jerman dan dipandang sebagai sebuah tamparan bagi proses integrasi Eropa.

3. Irlandia, Perdana Menteri Enda Kenny,

"I am very sorry that the result of the referendum is for the UK to leave the European Union. However, the British people have spoken and we fully respect their decisions. Ireland will, of course, remain a member of the European Union. That is profoundly in our national interest."

Irlandia menyesalkan bahwa keputusan referendum adalah bahwa Inggris meninggalkan Uni Eropa. Bagaimanapun masyarakat Inggris telah bersuara dan Irlandia secara penuh menghargai keputusan tersebut. Irlandia menyatakan bahwa mereka akan tetap menjadi anggota Uni Eropa karena hal tersebut sangat penting bagi kepentingan nasional mereka."www.bbc.com)

Pernyataan-pernyataan diatas cukup mewakili pandangan negara anggota Uni Eropa terhadap keputusan Inggris. Mereka sangat menyayangkan bahwa Inggris harus mengakhiri hubungannya dengan Uni Eropa, namun disisi lain tetap menghargai keputusan tersebut karena berasal dari aspirasi masyarakat. Mereka juga menekankan agar UE memperkuat kembali integrasi diantara negara anggota agar fenomena seperti Brexit tidak terulang kembali.

Walaupun Inggris bukan lagi menjadi bagian dari Uni Eropa, namun besar kemungkinan bahwa kerjasama dengan negara anggota Uni Eropa akan tetap berlangsung, mengingat hubungan saling ketergantungan antara Inggris dan beberapa negara Eropa seperti Irlandia Irlandia (12% dari GDP) berasal dari keuntungan ekspor ke Inggris, Yunani (7% GDP), Jerman (2,4% GDP) dan Polandia yang merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar di Inggris. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah ditekankan oleh dewan Eropa dan negara anggota lainnya bahwa Inggris harus segera melakukan prosedur penarikan diri, sebab arah hubungan Inggris dan Uni Eropa akan sangat bergantung pada negosiasi dalam masa penarikan diri tersebut.

Adapun keuntungan yang akan diperoleh Inggris pasca referendum menurut prediksi badan keuangan diperkirakan bahwa GDP Inggris akan meningkat sebesar 6% ditahun 2030. Selain itu, Inggris juga akan memperoleh kedaulatannya untuk menentukan berbagai perjanjian perdagangan, baik dengan negara anggota maupun diluar Uni Eropa. Para pendukung brexit juga menyatakan bahwa ekonomi Inggris akan tumbuh secara signifikan diluar Uni Eropa. Inggris tidak perlu lagi berkontribusi dalam anggaran Uni Eropa sehingga pos pendanaan tersebut dapat digunakan sepenuhnya bagi pembangunan nasional serta jaminan kesejahteraan masyarakat (www.ukpra.co.uk)

Kerangka Dasar Konsep

Konsep Regionalisme

Banyak ahli yang berpandangan bahwa kawasan (region) adalah daerah yang memiliki kedekatan secara geografis. Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi berdasarkan basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. (Nuraeini: 2010)

Berbeda dengan region, regionalisme dapat dilihat dalam dua kategori, (1) Berdasarkan kedekatan geografis, maka regionalisme berarti konsentrasi tidak seimbang dari aliran ekonomi atau koordinasi kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri antara sebuah kelompok negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan yang lainnya. Dapat juga berarti hubungan politik-militer negara-negara yang berdekatan secara geografis; (2) Bukan berdasarkan geografis, menurut Benjamin Cohen sebuah kelompok dari negara-negara yang secara bersama mengandalkan mata uang salah satu negara anggotanya berarti sebuah kawasan mata uang, walapun negara-negara tersebut tidak harus berada di lokasi yang berdekatan. Lebih jauh, negara-negara yang berbagi budaya, bahasa, agama atau latar belakang etnis yang sama –tetapi tidak berdekatan secara geografis-dapat dianggap sebagai rekan regional.(Edward D.Mansfield: 1997)

Kajian mengenai regionalisme juga berkaitan dengan pembahasan integrasi dan interdependensi antar negara dalam sebuah kawasan. Menurut Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbach, integrasi adalah suatu proses dimana dominasi system politik yang lebih besar menjadi meningkat serta bertambah dengan adanya penambahan unit-unit baru. Sedangkan menurut Martin Griffiths, integrasi terbagi dalam empat hal 1) Pergerakan menuju kerjasama antar negara; 2) Transfer otoritas kepada institusi supranasional; 3) Peningkatan penyamaan nilai-nilai; 4) Perubahan menuju masyarakat global dan pembentukan komunitas masyarakat politik baru.

Proses integrasi yang terjadi di kawasan Eropa dengan wujud Uni Eropa sering dijadikan sebagai modal keberhasilan regionalisme. Sebuah integrasi selalu diawali dengan adanya interdependensi yang dapat didefinisikan sebagai faktor pendorong integrasi dan penjaga keberlangsungan sebuah organisasi regional. Negara-negara menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri, dan globalisasi yang terjadi di dunia semakin menuntut ketahanan nasional yang mampu bersaing di kancah global. Namun, disisi lain, regionalisme juga memiliki kelemahan yaitu kedaulatan negara menjadi terbatas sehingga pengaruh organisasi supranasional akan sangat mencolok dan menyinggung rasa nasionalisme.

Teori Sistem Politik

Dalam teori politik yang ditulis oleh David Easton dalam bukunya “*An Approach to The Analysis of Political System*”memberikan sebuah penjelasan mengenai proses politik “*authoritative decision*” yang harus diambil dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Easton, dalam sebuah system terdapat aktivitas yang saling berhubungan dan membentuk sebuah proses atau di dalam sistem politik dikenal sebagai proses politik. Sistem politik selalu dibangun oleh unit-unitnya berupa tingkah laku, atau tindakan politik (*political action*), tersusun dalam bentuk peranan politik (*political role*) dan kelompok. Namun dalam sistem politik juga dibatasi oleh semua peranan politik yang erat hubungannya dengan pengambilan keputusan (*political decisions*) dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan efeknya ialah bahwa keputusan atau kebijakan dalam implementasinya memperoleh efektivitasnya, artinya dapat tercapai tujuan yang dicita-citakan.

Mengenai *input* dan *output* politik, *authoritative decisions* memiliki arti penting bagi masyarakat dan ini disebut sebagai *output* politik. Namun untuk memahami *output* politik perlu diketahui mengenai *input* politik sekaligus sistem politiknya. Sebab *output* politik dipengaruhi oleh proses politik dan begitupun sebaliknya. Dalam sebuah sistem pasti terdapat diferensiasi dan integrasi, diferensiasi artinya bahwa terdapat beberapa macam bagian dan tugas-tugas dalam sistem itu, terdapat pada struktur dimana semua tindakan atau peranan politik terjadi. Adapun integrasi diartikan sebagai sebuah mekanisme dimana semua unit-unit berperan dalam menentukan keputusan politik.

Adapun *demands* dan *support* dalam *input* politik berperan dalam dinamisasi sistem. Menurut Easton, *demands* merupakan informasi (bahan-bahan yang belum terolah) dan merupakan tenaga untuk memulai sebuah proses. Sistem politik terbentuk karena adanya orang-orang yang menghendaki kegiatan politik, sedangkan *demand* didapat dari perorangan atau kelompok. *Demands* dapat timbul baik dari internal maupun eksternal sistem. *Demands* dapat dianggap sebagai sesuatu yang serius, bergantung pada hubungan *demands* tersebut dengan lokasi supporternya didalam hubungan hirarki atau kekuasaan. Dalam hal ini jika *demands* berubah maka keputusan maupun kebijakan dapat berubah.

Aspek lain dari *input* politik adalah *support* (dukungan). Aspek ini dianggap sebagai kekuatan, baik dalam sikap maupun paham (argumentasi) sehingga akan sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil. Domain atas *support* terdiri atas tiga objek yaitu:

1. *Political Community*, tidak ada sebuah sistem politik yang dapat melanjutkan keberadaannya tanpa dukungan dari anggotanya. Pada level dukungan ini, kita tidak fokus pada apakah sebuah pemerintahan itu ada, maupun adanya loyalitas terhadap sebuah konstistusi. Dalam hal ini politik masyarakat dapat dilihat sebagai suatu konsensus nasional seperti persatuan bangsa, dengan demikian semua perbedaan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
2. *The Regime*, artinya semua harus memberikan dukungan terhadap *rule of the game* dan ketentuan konstitusi.
3. *The Government*, semua pihak harus memberikan dukungan pada pemerintah jika ia mampu untuk menjalankan semua keputusan yang telah dirundingkan. (David Easton: 1964)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatif-analisis, dimana penulis menjelaskan mengenai hubungan timbal balik yang menyebabkan Inggris menarik diri dari Uni Eropa. Data-data yang dipaparkan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui studi pustaka dan literatur terhadap sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dll.

Hasil Penelitian

Dalam masa keanggotaan Inggris di Uni Eropa yang telah berlangsung selama empat puluh tiga tahun, ide penarikan diri Inggris dari Uni Eropa bukan merupakan hal baru sebab di tahun 1975 Inggris pernah menggelar referendum berkaitan dengan masa depan hubungannya di Uni Eropa. Namun perolehan suara masyarakat sebesar 67%

menginginkan agar Inggris tetap berada dalam keanggotaan UE. Ditahun-tahun setelahnya hubungan yang terjalin antara Inggris dan Uni Eropa tidak berjalan dengan harmonis ditandai dengan keluarnya Inggris dari ERM (European Exchange Rate Mechanism) serta keputusan Inggris untuk berada diuar zona Euro.

Memburuknya hubungan Inggris di Uni Eropa menguatkan keberadaan kubu euroskeptis untuk menggalang dukungan masyarakat agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Adapun pada tahun 2005 ide penarikan diri Inggris menjadi sebuah manifesto pemilu yang dilakukan oleh partai Liberal Demokrat maupun Partai Konservatif. Dalam manifesto tersebut, kedua partai sama-sama menjanjikan pilihan referendum sebagai langkah untuk meratifikasi konstitusi Uni Eropa. Namun referendum tersebut tidak dapat terlaksana disebabkan penolakan Perancis dan Belanda atas ratifikasi konstitusi Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2008, pemimpin partai Liberal Demokrat menyerukan referendum ‘in-out’ keanggotaan Inggris di Uni Eropa namun tidak mendapat dukungan parlemen karena pada saat yang sama, Inggris harus meratifikasi traktat Lisbon sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan referendum.

Wacana referendum atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa terus bergulir dan menjadi cukup serius ketika pada bulan September tahun 2011 lebih dari 100.000 masyarakat menandatangani petisi online menyerukan referendum atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Petisi yang diajukan kepada pemerintah tersebut mendapatkan tanggapan dari komite bisnis Backbench berupa persetujuan untuk mengadakan pembahasan mengenai urgensi referendum untuk menentukan masa depan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan ketentuan hukum Inggris bahwa dukungan masyarakat semacam ini dapat diartikan sebagai mosi yang harus dibahas dalam House of Commons.

Dalam agenda pembahasan tuntutan referendum, Perwakilan Parlemen David Nuttall mengajukan mosi yang berisi tiga pilihan bagi masyarakat, apakah Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa berdasarkan hubungan sebelumnya, atau meninggalkan Uni Eropa, atautkah menegosiasikan kembali ketentuan keanggotaan dalam rangka menciptakan hubungan yang baru sesuai dengan prinsip perdagangan dan kerjasama. Pembahasan mosi yang telah disepakati bersama memberikan hasil keputusan melalui voting anggota parlemen dengan jumlah 483 suara memilih untuk menolak mosi sedangkan 111 suara menyetujuinya. Dengan perolehan tersebut, tuntutan masyarakat atas referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa tidak dapat diwujudkan.

Keberadaan tuntutan mengenai referendum UE menunjukkan bahwa pemahaman anti Eropa dikalangan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan dukungan terhadap euroskeptisme hingga mencapai 65% pada tahun 2012. Peningkatan dukungan tersebut berimplikasi pada peningkatan suara partai UKIP sebesar 10% sehingga hal ini mendorong PM David Cameron untuk memberikan janji politik dalam pidato Bloomberg yang menyatakan bahwa apabila partai konservatif memenangkan pemilu selanjutnya, maka ia akan menggelar referendum sebagai kelanjutan hubungan Inggris di Uni Eropa.

Pada pemilu tahun 2015, Partai konservatif dan David Cameron kembali memperoleh kemenangan sehingga referendum harus dilaksanakan sesuai dengan janji yang telah

diberikan. Namun, sebelum referendum digelar, Cameron terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pemimpin UE di Brussels pada tanggal 17-19 Februari 2016. Dalam pertemuan tersebut, Cameron mendapatkan kesepakatan bersama pemimpin UE bahwa Inggris akan mendapatkan status “istimewa” dalam komunitas tersebut. Uni Eropa juga menyepakati beberapa perubahan perjanjian sesuai dengan usulan Inggris. Namun setelah pertemuan tersebut, kubu anti UE justru semakin gencar mengkampanyekan agar Inggris segera keluar dari Uni Eropa.

Dalam proses harmonisasi hubungan Inggris di Uni Eropa yang telah berlangsung sejak tahun 1973, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Inggris memutuskan untuk menarik diri dari Uni Eropa yakni:

1. *Bangkitnya dukungan terhadap Euroskeptisme*

Salah satu alasan yang menyebabkan Cameron mengeluarkan janji politiknya adalah untuk membendung tekanan pergerakan euroskeptis yang semakin massif serta untuk mencegah bangkitnya dukungan masyarakat terhadap partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) yang selama ini memperjuangkan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa.

Euroskeptisme merupakan sebuah paham yang menginginkan pemutusan hubungan dengan Uni Eropa atau dapat diartikan sebagai oposisi dalam proses integrasi politik Eropa. Partai politik yang berpandangan euroskeptis biasanya cenderung memperhatikan masalah-masalah seputar populasi dan imigran. Dalam hal ini, partai UKIP merupakan partai berpandangan euroskeptis yang memiliki pendukung cukup besar di Inggris. Para pendukung partai ini selalu mengkritisi keberadaan imigran yang dianggap tidak berguna bagi kemajuan Inggris. (www.britannica.com) Paham euroskeptisme terus berkembang di Inggris sebagai salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan UE. Pada mulanya paham ini hanya memiliki sedikit dukungan, namun seiring perkembangannya jumlah dukungan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh British social attitudes menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an hingga tahun 2000 suara anti Eropa masih cenderung stabil, namun memasuki tahun 2006 hingga 2012 suara mereka meningkat tajam dari 15% menjadi 30%.

2. *Besarnya Iuran Uni Eropa*

Layaknya sebuah club, setiap negara anggota harus membayar iuran tahunan kepada Uni Eropa yang diperuntukan bagi kebijakan-kebijakan Eropa seperti kebijakan pertanian, bantuan bagi negara anggota yang lebih miskin, penelitian, dan beberapa proyek pembangunan Uni Eropa.

Pada tahun 2015 Inggris merupakan negara kontributor anggaran terbesar ketiga setelah Jerman dan Perancis dengan jumlah pembayaran sebesar 17,8 miliar sehingga setiap orang di Inggris harus menyumbang sebesar 200 Euro dalam anggaran Uni Eropa. Dalam konteks ini, iuran Inggris kepada Uni Eropa jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran dalam negeri yang hanya berjumlah 9 miliar Euro per tahun. Disamping itu, besarnya jumlah iuran yang dibayarkan Inggris tidak sebanding dengan penerimaan yang diperoleh kembali, hal ini terlihat dalam data parlemen Inggris yang menunjukkan bahwa iuran bersih (setelah

dipotong *rebate*) yang diberikan Inggris sejak di tahun 2010 rata-rata sebesar 12-14 miliar Euro, sedangkan penerimaan menunjukkan bahwa Inggris hanya menerima rata-rata sebesar 3-4,6 miliar Euro. Dengan adanya ketimpangan dalam hal kontribusi dan penerimaan anggaran ini, Inggris merasa terbebani dengan iuran yang harus dibayarkan pada Uni Eropa.

3. Kebijakan Uni Eropa yang Tidak Efisien

Inggris merupakan salah satu negara yang aktif memberikan kritik terhadap kinerja CAP (Common Agricultural Policy). CAP merupakan sebuah sistem subsidi dan dukungan bagi pertanian yang dijalankan oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk menjamin level minimum produksi pertanian sehingga warga Eropa memiliki kecukupan bahan pangan dan mengatur harga produk pertanian.

Kritik Inggris terhadap CAP berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sangat besar (70% dari anggaran Uni Eropa), namun hanya dirasakan oleh 20% petani Eropa. Menurut Inggris, kebijakan CAP hanya menguntungkan negara dengan sektor pertanian besar seperti Jerman dan Perancis, sementara Inggris yang juga merupakan kontributor utama anggaran UE hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil. Kekecewaan Inggris terhadap CAP pernah dimanifestasikan oleh Margaret Thatcher dengan melakukan tuntutan rebate dalam anggaran Inggris ke Uni Eropa, hingga pada akhirnya Uni Eropa mengabulkan tuntutan rebate tersebut. Selain itu, di tahun 2005 PM Tony Blair juga pernah menyatakan bahwa CAP harus melakukan perbaikan dan menghilangkan pemborosan dalam proyek-proyek pertanian yang tidak efisien.

Sikap penentangan Inggris terhadap kebijakan Uni Eropa ini dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan terhadap kepentingan nasionalnya. Namun dalam hal ini Inggris mengabaikan sebuah prinsip bahwa keberadaan negara anggota Uni Eropa tidak sekedar untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing, namun juga untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

4. Permasalahan Eurozone

Berdasarkan poin pertama dalam tuntutan Inggris, disebutkan bahwa Inggris menginginkan perlindungan terhadap akses pasar tunggal, sekalipun Inggris bukan termasuk dalam anggota zona Euro. Adapun pada tahun 2003, Menteri keuangan Inggris Gordon Brown menyatakan bahwa Inggris perlu untuk menjalani lima tahapan uji coba sebelum masuk kedalam zona Euro. Tahap pertama adalah penyesuaian siklus bisnis dan struktur ekonomi sehingga Inggris dapat berjalan sesuai dengan tingkat suku bunga zona Euro. Tahap dua adalah bahwa sistem dalam zona Euro cukup flexibel untuk menyelesaikan permasalahan anggota secara individu maupun kolektif. Tahap ketiga bahwa dengan mengadopsi Euro akan menjamin kondusifitas bagi perusahaan maupun individu yang berinvestasi di Inggris. Tahap keempat bahwa Euro memungkinkan bagi industri jasa keuangan nasional untuk tetap berada dalam posisi kompetitif dalam kancah internasional. Tahap terakhir bahwa dengan mengadopsi Euro seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan peningkatan lapangan pekerjaan. Namun setelah dua tahun masa penentuan penerimaan Euro, Gordon Brown memutuskan

bahwa Inggris tidak masuk ke dalam zona Euro karena lima tahap percobaan yang diajukan mengalami kegagalan.

Alasan lain yang menyebabkan Inggris tidak dapat menerima Euro adalah bahwa pemerintah tidak ingin melepaskan kendali atas nilai suku bunga kepada mekanisme Euro, sebab hal tersebut akan mengurangi kenyamanan bagi investor yang terbiasa menukarkan pounds dan dolar namun harus berubah sesuai dengan nilai euro. Selain itu, dengan bergabung ke dalam zona Euro nilai suku bunga Inggris akan diatur oleh ECB (European Central Bank) dan hal ini akan menyebabkan masalah ketika nilai suku bunga ECB lebih tinggi dibandingkan pounds, sebab konsumen industri properti Inggris sangat sensitif pada perubahan tarif dasar.

Setelah Inggris memutuskan untuk berada diluar zona Euro maka muncul sebuah konsekuensi dimana terdapat perbedaan yang cukup nampak antara negara anggota dan non anggota zona euro. Dalam hal ini, negara non zona euro tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan negara zona Euro sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi Inggris untuk terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dalam kerangka internal zona euro. Perlakuan khusus UE terhadap zona euro dalam hal regulasi maupun mekanisme perdagangan membuat Inggris berasumsi bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap negara non-zona euro. Asumsi tersebut muncul berdasarkan ketentuan UE bahwa dalam sebuah perundingan, negara zona euro dapat mengeluarkan negara non-euro, walaupun keputusan UE seringkali melibatkan persetujuan keseluruhan anggota.

Untuk menjawab tuntutan Inggris mengenai permasalahan zona euro, maka Uni Eropa memberikan sebuah kesepakatan yang menjamin bahwa negara non-zona euro seperti Inggris tidak akan didiskriminasikan serta kesepakatan bahwa hak veto bagi negara zona euro akan dihilangkan.

5. Imigran

Kebijakan Uni Eropa mengenai kebebasan perpindahan manusia di satu sisi memberikan manfaat bagi Inggris dalam memudahkan arus mobilitas. Namun disisi lain kebijakan tersebut membuka akses yang besar bagi masuknya pekerja imigran. Berdasarkan data statistik nasional, sekitar 2.938.000 warga Uni Eropa tinggal di Inggris, jumlah ini menempati 4,6% dari total populasi Inggris di tahun 2014.

Berasarkan data yang dirilis oleh CEP (*Centre of Economic Performance*) menyatakan bahwa antara tahun 1995-2015 jumlah imigran di Inggris meningkat tiga kali lipat dari 0,9 juta menjadi 3,3 juta jiwa. Hampir 70% imigran UE menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Inggris berhubungan dengan masalah pekerjaan. Besarnya arus imigran di Inggris menyebabkan munculnya permasalahan sosial berupa persaingan dalam pasar tenaga kerja. Berdasarkan data (www.Ise.ac.uk) persentase tenaga imigran UE jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal dengan rentang sebesar 20% serta persentase distribusi pekerjaan diberikan lebih besar kepada warga imigran baik imigran yang berasal dari UE maupun diluar UE, sedangkan jumlah persentase lebih kecil diperoleh tenaga kerja lokal.

Kesimpulan

Dalam proses harmonisasi hubungan Inggris dan Uni Eropa yang telah terjalin selama 43 tahun, terjadi beberapa pertentangan yang menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat agar Inggris menarik diri dari Uni Eropa. Tuntutan masyarakat kemudian mengalami serangkaian proses sehingga dapat diwujudkan melalui janji politik yang diberikan oleh PM David Cameron untuk menggelar referendum penentuan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Referendum dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 dengan melibatkan konstituen-konstituen Inggris Raya yang berada di England, Skotlandia, Wales, Irlandia. Berdasarkan *voting* yang dilakukan diperoleh hasil kemenangan kubu *leave* dengan jumlah suara sebesar 51,9%. Dengan kemenangan mayoritas suara *leave*, maka proses penarikan diri Inggris selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan traktat Lisbon pasal 50.

Keputusan Inggris menarik diri dari Uni Eropa memberikan berbagai konsekuensi dalam bidang politik maupun Ekonomi. Dalam bidang politik, terbentuk dua kubu dikalangan masyarakat maupun elit politik Inggris yakni kubu pendukung brexit yang diwakili oleh Walikota London Boris Johnson dan kubu penentang brexit yang aktif disuarakan oleh PM David Cameron dan menteri keuangan Inggris George Osbon.

Adapun alasan Inggris dalam penarikan dirinya di Uni Eropa berkaitan dengan permasalahan ekonomi berupa rasa keberatan atas anggaran Uni Eropa yang terlalu besar sedangkan penerimaan kembali yang diterima Inggris lebih kecil. Selain itu permasalahan Imigran dan Zona Euro juga turut mempengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih melepaskan diri dari mekanisme Uni Eropa.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisusilo JR, Sutardjo. 2006. *Integrasi Ekonomi Eropa*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Terj. Marbun, Mercedes. Bandung: Sinar Baru.
- Holsti, KJ. 1988. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Terj. M Tahir Azhary. Jakarta: Erlangga.
- Jackson, Robert dan Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.Groth, Alexander. 1967. *Contemporary Politics Europe*. Massachusettes: Winthrop Publishers.
- Mansfield, Edward D dan Milner, Helen V. 1997. *The Political Economy of Regionalism*, New York: Columbia University Press.
- Papasi, J.M, Prof. DR. 2010. *Ilmu Politik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Perwita, DR Anak Agung Banyu dan DR. Yanyan Mochamad Yani 2006.
Pengantar 11mu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Vasbo, Sophie N. 2015. *Economic Consequences of Brexit for The United Kingdom*,
Copenhagen University.

Rosenau, James N. 1969. *International Politics And Foreign Policy: A Reader in
Research and Theory*. New York: The Free Press.

Internet

After Brexit, Could Poland and Austria Be Next?
<http://voanews.com>, diunduh tanggal 22 November 2016.

Article 50,
<http://www.lisbon-treaty.org>, diunduh tanggal 9 Januari 2017.

Back to the future? Britain's 1975 referendum on Europe,
<http://newstatesman.com>, diunduh tanggal 13 Juni 2017.

Brexit All You Need to Know About UK leaving UE,
<http://bbc.com/news/uk-politics-3281088>, diunduh tanggal 21 Oktober 2016.

Easton, David. An Approach to The Analysis of Political System,
<http://www.jstor.org>.

Economic Crisis And Economic Disparities In European Union, *CES Working Papers*
– Volume VII, Issue 2A,
http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2A_CRU.pdf , diunduh tanggal
17 Juli 2017.

EU Referendum: The Brexit Report,
<http://www.ukpra.co.uk>, diunduh tanggal 23 Juli 2017.

EU Referendum 2016: What are the full details of Cameron's deal, All the Key
Points,
<http://express.co.uk>, diunduh tanggal 5 Juni 2017.

EU Speech at Bloomberg,
<http://www.gov.uk>, diunduh tanggal 7 Juni 2017.

Inggris Tinggalkan UE, Poundsterling Turun Pada Titik Terendah,
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/_dunia_poundsterling
terpuruk](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/_dunia_poundsterling_terpuruk), diunduh tanggal 23 Januari 2017.

North and South Jurnal Center Piece 2004,
<http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/CP163>, diunduh tanggal 17 Juli 2017

Penentuan Nasib Inggris atau Nasib Uni Eropa,

http://kbr.id/0620/6/brexit__penentuan_nasib_inggris_atau_nasib_uni_eropa782409.html, diunduh tanggal 6 November 2016.

Pros and cons for leaving the EU,

<http://metro.co.uk>, diunduh tanggal 24 Februari 2017.

Reaksi dunia atas keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa,

http://www.bbc.com/indoonesia/dunia/2016/06/160624_dunia_reaksi_leave, diunduh tanggal 23 Januari 2017.

Sekilas Uni Eropa,

<http://eeas.europa.eu>, diunduh tanggal 21 Oktober 2017.

Understanding the leave vote,

<http://www.Natcen.ac.uk>, diunduh tanggal 12 Februari 2017.

What is the EU, why was it created and when was it formed

<http://Telegraph.co.uk>, diunduh tanggal 12 Oktober 2016.

Sejarah Pembentukan Uni Eropa,

<http://www.indonesian-mission-eu.org>, diunduh tanggal 21 Oktober 2016.

The European Single Market

<https://ec.europa.eu>, diunduh tanggal 7 Juni 2017.

40 Year Relationship with the EU,

<http://www.telegraph.co.uk>, diunduh tanggal 16 Juni 2017.